

Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Herlina Sakawati¹, Aslinda²

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Abstract. BUMDes is a village business forum that has a spirit of independence, togetherness and mutual cooperation between the village government and the community to develop local assets to provide services and increase the economic income of the community and villages. Based on the activity plan, the output targets generated after the activity are an increase in understanding of the village community and village officials in the Donri-Donri District of Soppeng Regency related to the existence of BUMDes. It is also hoped that each village has and can run and develop Village Owned Enterprises. After being given training shows that participants have understood the importance of BUMDes, the types of businesses that can be managed by the village, problems that are often encountered and the solution, to the way of managing BUMDes. Based on the results of the service, the advice given is that a follow-up is needed, namely starting to establish or develop BUMDes. Therefore, there is a need for synergy from village officials, village facilitators, regional officials or NGO activists to jointly manage BUMDes.

Keywords: BUMDes, village communities

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Namun, secara geografi desa berjarak cukup jauh dengan pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Kesenjangan yang terjadi antara Desa dan Kota membuat adanya tren pergeseran ke Kota. Masyarakat cenderung berpindah ke Kota karena beranggapan di Kota lebih mudah mendapatkan kesempatan kerja.

Adanya ketidakseimbangan antara pembangunan di Kota dan di Desa juga berakibat buruk secara sosial dan ekonomi terhadap kehidupan di kedua wilayah masyarakat tersebut. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan Desa dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang terkait tentang Desa, salah satu diantaranya yang membawa perubahan besar bagi Desa adalah dengan adanya dana Desa.

Dana Desa merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup warga di pedesaan.

Undang-Undang Desa yang diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan, salah satu prioritas pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes.

BUMDes merupakan wadah usaha Desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan Desa. Berdasarkan rencana kegiatan, maka target luaran yang dihasilkan setelah kegiatan yaitu peningkatan pemahaman masyarakat Desa dan aparat Desa di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng terkait dengan adanya BUMDes juga diharapkan setiap desa memiliki dan dapat menjalankan serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.

Program ini bertujuan memberikan pelatihan pengelolaan BUMDes kepada masyarakat Desa di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Berdasarkan rencana kegiatan, maka target luaran yang dihasilkan setelah kegiatan yaitu: memahami pentingnya BUMDes, jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh Desa, permasalahan yang sering ditemui dan solusinya, hingga cara pengelolaan BUMDes.

B. Permasalahan Mitra

Beberapa permasalahan yang seringkali muncul dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yang menyebabkan sulit untuk mencapai tujuan dari BUMDes itu sendiri diantaranya: 1) Penataan kelembagaan Desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa, 2) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di Desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik, 3) Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga Desa, 4) Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai

patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan, 5) Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

C. Target

1. Untuk memberikan informasi mengenai pentingnya BUMDes.
2. Untuk menjelaskan jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh Desa.
3. Memberikan penjelasan permasalahan yang sering ditemui dan solusinya.
4. Memberikan penjelasan mengenai cara pengelolaan BUMDes.

D. Luaran

Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat Desa dan aparat Desa di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng terkait dengan adanya BUMDes juga diharapkan masyarakat memahami pentingnya BUMDes, jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh Desa, permasalahan yang sering ditemui dan solusinya, hingga cara pengelolaan BUMDes, sehingga setiap desa memiliki dan dapat menjalankan serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.

II. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut, kemudian dirumuskan metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan

Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Ceramah dan sosialisasi

Langkah awal dalam kegiatan workshop ini adalah:

1. Kegiatan workshop pengelolaan Badan Usaha Milik Desa didahului oleh orientasi peserta Workshop dan *Pre Test*, kemudian memberikan ceramah mengenai Badan Usaha Milik Desa dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

b. Pelatihan dan pendampingan

Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa dan masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

c. Evaluasi

Bentuk evaluasi kegiatan Workshop pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah dengan memberikan

Post test kepada peserta mengenai pendampingan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bidang TIK dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat tanggal 27-28 September 2018. Kegiatan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA. Kegiatan diawali dengan mengumpulkan peserta di ruangan yang sekaligus sebagai tempat pelatihan.

Pada pelaksanaan ditahap pertama: *Pre-Test*; Sebelum memulai pelatihan pengelolaan BUMDes, para peserta diberikan tes pendahuluan guna mengetahui sejauh mana pengetahuan dasar mereka tentang BUMDes. Selanjutnya pada Tahap kedua; para peserta yang mengikuti pelatihan, diberikan materi tentang BUMDes mulai dari aturan hukum, tujuan BUMDes, BUMDes sebagai pilar ekonomi masyarakat desa serta potensi-potensi desa yang dapat dikelola untuk dijadikan BUMDes. Hasil evaluasi diperoleh bahwa tingkat keaktifan dan partisipasi aktif peserta, kedisiplinan, antusias dan motivasi peserta cukup baik. Hal ini dilihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti dan berdiskusi mengenai BUMDes selama proses pelatihan berlangsung. Kemudian pada Tahap ketiga: *Post-Test*, hasil secara keseluruhan dari para peserta setelah diberikan pelatihan menunjukkan bahwa peserta sudah memahami pentingnya BUMDes bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat desa. Peserta juga sudah memiliki banyak ide yang akan segera di tindak lanjuti untuk dijadikan BUMDes yang dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, bahwa kegiatan pengabdian ini mendapat respon yang positif dari para peserta pelatihan, dimana para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan ini, dan hasilnya juga sangat baik.

Peserta pelatihan merasa senang dengan adanya kegiatan seperti ini dan sangat antusias. Hal ini terlihat pada saat kegiatan pelatihan berlangsung, terjadi banyak diskusi dan interaksi antara peserta dan pemateri. Banyak ide-ide baru dan pemikiran baru yang ditemukan peserta sebagai potensi yang cocok dijadikan BUMDes di desa mereka. Sebelumnya peserta masih sangat minim pengetahuannya tentang BUMDes dan menganggap bahwa pendirian BUMDes di desa mereka mustahil dikembangkan.



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
ISBN: 978-602-555-459-9**

IV. KESIMPULAN

Dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta menjadi termotivasi untuk membuka BUMDes dan mengelola BUMDes secara profesional, transparansi dan akuntabel. Jelas terlihat pula bahwa masih banyak masyarakat desa yang peduli dengan kemajuan desanya dan bersemangat untuk membangun perekonomian di desa mereka masing-masing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan kami, oleh karenanya ucapan terima kasih layaklah kami haturkan kepada: Rektor Universitas Negeri Makassar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar, Kepala Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Para Kepala Desa di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dan semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Jatim online. 2013. Pentingnya Peningkatan Sumber Daya Manusia. [online], (<http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/2013/pentingnya-peningkatan-kualitas-sdm>), diakses pada tanggal 19 Februari 2017.
- Kemendagri. 2014. Perangkat Desa Segera Jalani Pelatihan Keuangan. [online], (<http://www.kemendagri.go.id/news/2014/03/12/perangkat-desa-segera-jalani-pelatihan-keuangan>), diakses pada 19 Februari 2017.
- Pantaudes.com. Camat Sibulue Fokus Tingkatkan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa. [online], (<http://www.pantaudes.com/camat-sibulue-fokus-tingkatkan-kapasitas-aparat-pemerintah-desa/>), diakses pada tanggal 19 Februari 2017.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, H.A.W. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.